



DAMPAK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN: STUDI KASUS PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI INDONESIA

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IMPACT ON VULNERABLE COMMUNITIES: CASE STUDY OF NATIONAL STRATEGIC PROJECTS IN INDONESIA

Visilya Faniza^{a*}

^aPeneliti Independen; Bandung, Indonesia

*Korespondensi: visilya09@gmail.com

Info Artikel:

• Artikel Masuk: 14 Mei 2024

• Artikel diterima: 31 Desember 2025

• Tersedia Online: 31 Desember 2025

ABSTRAK

Proyek Strategis Nasional yang ada di Indonesia idealnya mengikuti kaidah pembangunan berkelanjutan, khususnya merujuk pada Sustainable Development Goals (SDGs) yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Basis pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan SDGs berlandaskan pada tiga pilar yakni lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan Proyek Strategis Nasional terhadap kelompok rentan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode analisis yang dilakukan adalah content analysis yang bersumber dari artikel jurnal, situs pemerintah, laman berita, dan media sosial masyarakat rentan. Hasil penelitian menunjukkan proses dari beberapa pembangunan Proyek Strategis Nasional belum memenuhi tiga pilar SDGs. Proyek Bendungan Bener, proyek Bandar Udara Internasional Yogyakarta, proyek Tol Tanggul Laut Semarang-Demak dan program smelter nikel Morowali memberikan dampak yang negatif secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Permasalahan ini dapat diatasi jika pemerintah mengkaji ulang rencana Proyek Strategis Nasional dan melibatkan masyarakat di wilayah pembangunan.

Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Proyek Strategis Nasional, Komunitas Rentan

ABSTRACT

National Strategic Projects in Indonesia should ideally adhere to the principles of sustainable development, specifically referring to the Sustainable Development Goals (SDGs) formulated by the United Nations. The basis of sustainable development in accordance with the SDGs is based on three pillars: environmental, social, and economic. This study aims to analyze the environmental, social, and economic impacts that occur during the development process of National Strategic Projects on vulnerable groups. The approach used in this study is a qualitative approach. The analytical method used is content analysis sourced from journal articles, government websites, news pages, and social media of vulnerable communities. The results of the study indicate that the development process of several National Strategic Projects has not met the three pillars of the SDGs. Bendungan Bener Project, Yogyakarta International Airport project, the Semarang-Demak Sea Wall Toll Project, and the Morowali nickel smelter program have had negative environmental, social, and economic impacts. This problem can be overcome if the government re-examines the National Strategic Project plan and involves communities in the development area.

Keywords: Sustainable Development, National Strategic Projects, Vulnerable Communities

Copyright © 2025 by Authors, Published by Universitas Diponegoro Publishing Group.
This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan di masa depan (IISD, 2020). Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2015 telah mengadopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang tertuang di dalam 17 Sustainable Development Goals (SDGs) (Department of Economic and Social Affairs of United Nation, 2022).

Dalam pelaksanaan dan tujuannya, SDGs memiliki tiga pilar utama, yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi (Cham, 2023). Lingkungan berkelanjutan memastikan aktivitas manusia tidak memberi dampak buruk terhadap lingkungan di masa depan (Sahin & Mete, 2016). Contoh dari aktivitas manusia yang dimaksud adalah manajemen sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan hidup (Hafizyar & Dheyaaldin, 2019). Pilar sosial mencakup penjaminan kesejahteraan masyarakat berupa kesetaraan, hak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan, hak atas pangan dan hak memiliki tempat tinggal (Sahin & Mete, 2016). Pembangunan berkelanjutan juga memiliki pilar ekonomi, di mana pembangunan harus memikirkan dampak perekonomian negara dan masyarakat dalam jangka panjang (Hafizyar & Dheyaaldin, 2019).

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia ikut berkomitmen dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini terlihat pada dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025-2045 (Bappenas, 2023) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Bappenas, 2020). Komitmen ini dapat diartikan bahwa pemerintah dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Proyek Strategis Nasional adalah bentuk upaya pemerintah mengatasi kekurangan infrastruktur dan dampak krisis global tahun 2008-2012 yang menyebabkan turunnya investasi (Limanseto, 2023). Dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016, pelaksana Proyek Strategis Nasional adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha strategis dalam meningkatkan dan meratakan pembangunan. Dokumen Permenko Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional menyebutkan Proyek Strategis Nasional memiliki 200 proyek dan 12 program di seluruh Indonesia (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional). Sebanyak 81 proyek dan 1 program berlokasi di Pulau Jawa. Pulau Sumatera mendapatkan 42 proyek, 13 proyek di Pulau Kalimantan, 22 proyek di Pulau Sulawesi, 18 proyek di Nusa Tenggara dan Bali, 13 proyek di Maluku dan Papua, dan 11 proyek dan 11 program tersebar nasional (Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 2021). Pembangunan dalam kategori proyek berupa pembangunan jalan, bendungan dan irigasi, kawasan, perkebunan, kereta api, energi, pelabuhan, air bersih dan sanitasi, bandar udara, pariwisata, perumahan, pendidikan, tanggul pantai dan teknologi. Sementara pembangunan berupa program adalah akses exit tol, smelter, ketenagalistrikan, penyediaan pangan, jembatan ekonomi, instalasi pengolahan sampah, kawasan perbatasan, superhub, pengembangan wilayah, kawasan ekonomi khusus dan industri gula dan sawit (Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 2021). Laporan semester kedua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pada tahun 2022 menyatakan sebanyak 153 proyek selesai dalam jangka waktu 2016-2022 (KPPIP, 2022).

Target dari Proyek Strategis nasional idealnya adalah pembangunan yang bisa dimanfaatkan seara langsung oleh masyarakat. Proyek Strategis Nasional sendiri proses pembangunannya bersinggungan secara langsung dan memberikan dampak kepada masyarakat, sehingga idealnya masyarakat yang terdampak perlu dilibatkan dalam proses pembangunannya. Pada kondisi di lapangan, partisipasi masyarakat terdampak dalam proses pembangunan proyek infrastruktur masih sangat minim, baik dalam tahap perencanaan, pembangunan dan penerimaan manfaat (Maftuchan, 2021). Pada umumnya di Indonesia proses pengambilan keputusan yang didominasi oleh pemerintah dan pihak swasta mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan (Ervianto, 2017; Pramawati et al., 2024). Hal ini bertentangan dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 yang menyebut salah satu tujuan dari pembangunan dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Masyarakat agraria dan maritim sering kali menjadi kelompok rentan dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional. Munculnya konflik kepentingan, kepemilikan lahan dan lingkungan masyarakat tidak jarang menimbulkan kasus kekerasan dan berpotensi terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (Maftuchan, 2021). Proyek Strategis Nasional seharusnya memberikan keuntungan kepada masyarakat, namun pada kasus tertentu di lapangan justru menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dampak pembangunan Proyek Strategis

Nasional berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan melalui Proyek Strategis Nasional di Indonesia perlu dikaji secara kritis karena berpotensi menimbulkan marginalisasi dan ketidakadilan bagi kelompok rentan, sehingga diperlukan pendekatan yang menjamin keadilan sosial dan inklusivitas dalam setiap tahapan pembangunan.

2. DATA DAN METODE

2.1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *qualitative content analysis*. *Qualitative content analysis* adalah metode penelitian yang menganalisis sumber data yang dikategorikan dan disusun secara sistematis (Coe & Scacco, 2017). Penelitian ini mengkategorikan proyek berdasarkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Proyek Strategis Nasional yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Sampel yang dianalisis dipilih dengan metode *purposive sampling* berdasarkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari 200 proyek dan 12 program (Tabel 1) dalam Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam dokumen Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Tabel 1. Daftar Program Strategis Nasional

No.	Daftar Program Strategis Nasional
1	Program Ketenagalistrikan
2	Program Pemerataan Ekonomi
3	Program Pengembangan Kawasan Perbatasan
4	Program Pengembangan Jalan Akses Exit Toll
5	Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
6	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)
7	Program Pembangunan Smelter
8	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional/Food Estate
9	Program Pengembangan Superhub
10	Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan
11	Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
12	Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit

Sumber: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, proyek yang dikaji dalam penelitian ini adalah proyek Bendungan Bener, proyek Bandar Udara Internasional Yogyakarta, proyek Tol Tanggul Laut Semarang-Demak dan program smelter nikel Morowali. Keempat sampel ini dipilih karena merepresentasikan ragam sektor pembangunan dalam Proyek Strategis Nasional, memiliki skala dampak sosial-ekonomi yang besar, serta menimbulkan dinamika konflik dan kerentanan yang berbeda bagi masyarakat sekitar sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai relasi antara pembangunan berkelanjutan dan kelompok rentan di Indonesia.

Tahapan analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

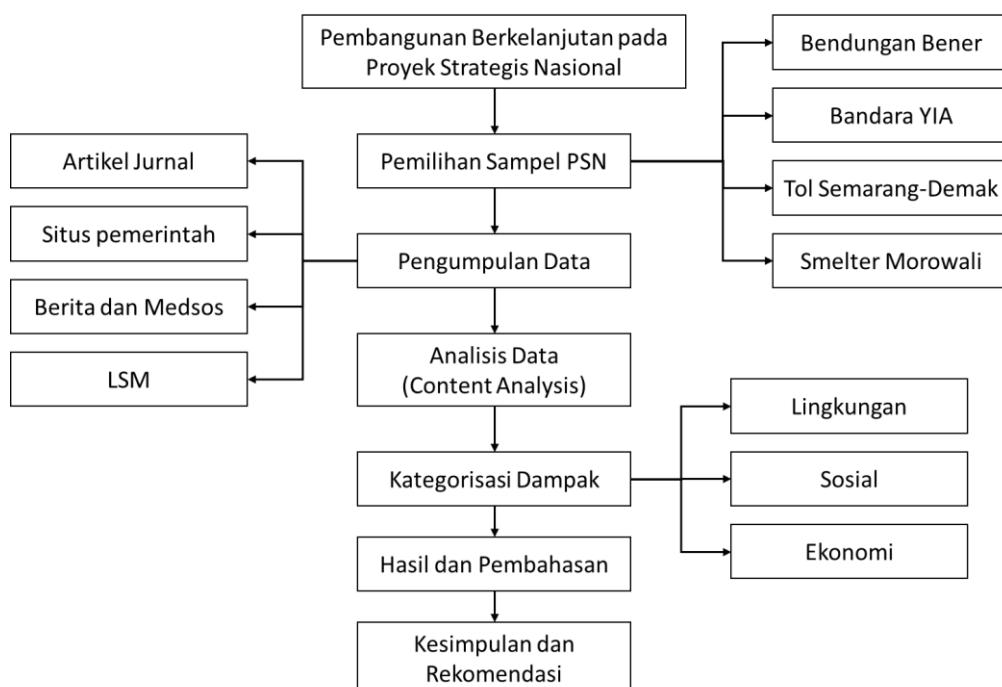
1. Pengumpulan data dari artikel ilmiah, situs resmi pemerintah, laporan lembaga, portal berita, media sosial masyarakat terdampak, serta publikasi LSM.
2. Reduksi data dengan cara memilih informasi relevan yang berkaitan dengan isu dampak PSN terhadap kelompok rentan.
3. Kategorisasi data berdasarkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi.
4. Koding tematik untuk mengidentifikasi isu-isu utama, seperti konflik lahan, degradasi lingkungan, hilangnya mata pencaharian, marginalisasi perempuan, atau ketimpangan distribusi manfaat.
5. Interpretasi hasil analisis dengan menghubungkannya pada teori pembangunan berkelanjutan dan prinsip inklusivitas.

Variabel analisis dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga pilar pembangunan berkelanjutan:

1. Lingkungan: degradasi lahan, pencemaran, risiko bencana, perubahan ekosistem.
2. Sosial: konflik horizontal dan vertikal, pelanggaran HAM, marginalisasi kelompok adat atau perempuan, hilangnya hak bermukim.
3. Ekonomi: hilangnya mata pencaharian, ketidakadilan kompensasi, ketimpangan pendapatan, distribusi manfaat pembangunan.

2.2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini antara lain: (1) artikel ilmiah; (2) situs pemerintah; (3) portal berita; (4) media sosial masyarakat; dan (5) publikasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Data-data ini didapat dengan cara studi literatur. Data-data tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode *qualitative content analysis*. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang berkaitan dengan topik penelitian, dalam hal ini dampak pembangunan berkelanjutan terhadap kelompok rentan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Proyek Strategis Nasional dimulai sejak tahun 2016. Daftar Proyek Strategis Nasional telah mengalami enam kali perubahan dari tahun 2016-2022 (KPPNP, 2022). Beberapa proyek dan program yang terdaftar sebagai Proyek Strategis Nasional adalah Bendungan Bener, Bandar Udara Baru Yogyakarta, Jalan Tol Semarang - Demak, Program Pembangunan Smelter di Morowali.

3.1. Bendungan Bener, Purworejo, Jawa Tengah

Bendungan Bener merupakan proyek pembangunan bendungan di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan ini sudah dimulai sejak Maret 2018 seiring dengan ketetapan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/41 tahun 2018 (Hidajat, 2021). Tujuan pembangunan Bendungan Bener adalah untuk memenuhi kebutuhan air Bandara Internasional Yogyakarta, irigasi Kabupaten Purworejo dan sekitarnya, serta pembangkit listrik tenaga air (Sefani et al., 2024).

Pembangunan Bendungan Bener membutuhkan bahan baku berupa batu andesit. Lokasi penambangan batu andesit yang dipilih adalah Desa Wadas. Permasalahan yang muncul akibat rencana pembangunan Bendungan Bener datang dari masyarakat Desa Wadas yang menolak penambangan batu andesit di Desa Wadas (Hidajat, 2021; Sefani et al., 2024; Sibuea, 2022). Penambangan ini dikhawatirkan akan memberi dampak buruk pada kondisi lingkungan, sosial, dan perekonomian di Desa Wadas. Merespon sikap pemerintah yang tetap menjalankan pertambangan, masyarakat Desa Wadas membangun komunitas GEMPADEWA (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas) yang terus aktif melakukan penolakan dan memperjuangkan kesejahteraan mereka dan terdokumentasikan pada akun media sosial X @Wadas_Melawan (Gambar 2).



Sumber: Wadas Melawan, 2024
Gambar 2. Akun Media Sosial GEMPADEWA

3.1.1. Lingkungan

Luas penambangan material batu andesit untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener di Desa Wadas adalah sebesar 114 hektar (Hidajat, 2021). Penambangan tersebut diperkirakan akan dilakukan dengan cara pengeringan dan peledakan dengan 5300 ton dinamit (Sefani et al., 2024). Kegiatan pertambangan ini dinilai berbahaya untuk ketahanan lingkungan Desa Wadas yang memiliki risiko longsor dan kekeringan. Hal ini diperparah dengan pembangunan jalan menuju wilayah penambangan yang mengorbankan hutan yang ada di Desa Wadas.



Sumber: Wadas Melawan, 2023

Gambar 3. Penggundulan hutan di Desa Wadas

Penggundulan hutan di wilayah Desa Wadas untuk pembangunan akses jalan menuju wilayah pertambangan sudah menunjukkan dampaknya (Gambar 3). Menurut akun media sosial GEMPADEWA pada Maret dan Juli 2023, wilayah Desa Wadas kembali dilanda banjir di musim penghujan (Gambar 4). Wilayah Desa Wadas selama ini merupakan daerah rawan bencana longsor. Tingkat risiko bencana longsor di wilayah ini semakin meninggi sejak dimulainya penambangan andesit.

 **Wadas Melawan**
@Wadas_Melawan

WADAS BANJIR AKIBAT KERUSAKAN ALAM UNTUK AKSES TAMBANG

Hari Sabtu 25 Maret 2023 Desa Wadas mengalami banjir yang cukup besar tepat di area akses jalan tambang andesit di Dusun Karang. Selain memperparah kondisi jalan, banjir juga masuk ke pemukiman warga dan mushola.

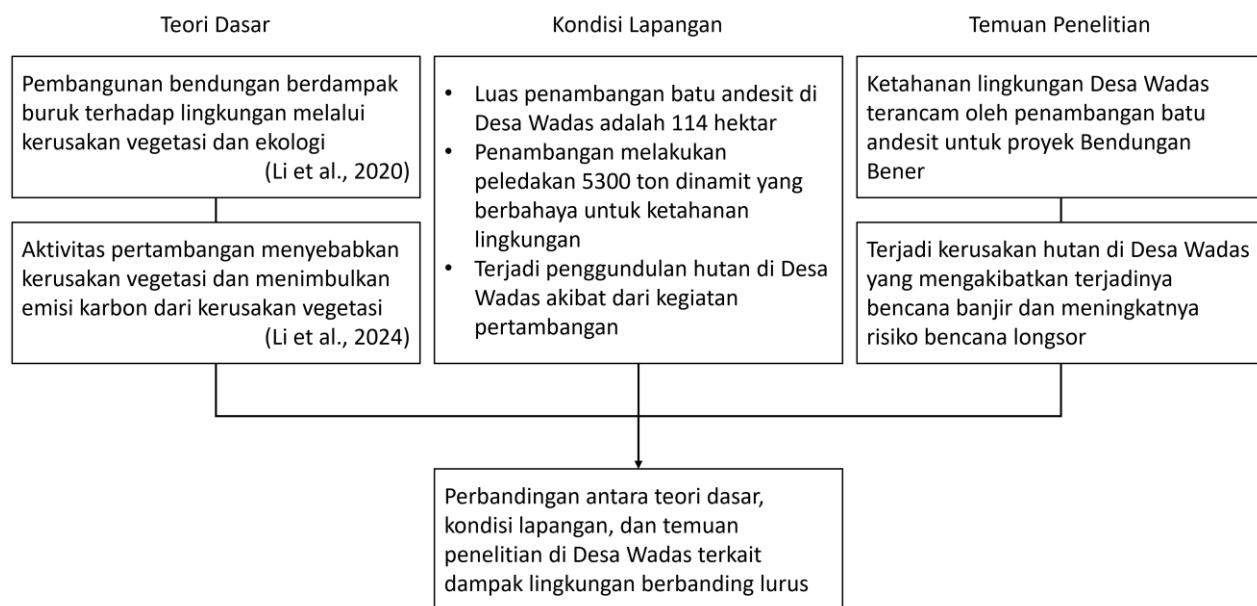
 **Wadas Melawan**
@Wadas_Melawan

Wadas Banjir Lagi, Pemerintah Harus Batalkan Tambang Andesit
Hari ini 8 Juli 2023, banjir kembali melanda desa Wadas. Banjir kali ini tidak hanya air tetapi bercampur dengan lumpur. Akibat banjir ini dua rumah dan jalan utama desa Wadas tergenang,

Sumber: Wadas Melawan, 2023
Gambar 4. Informasi Banjir di Desa Wadas

Dialog teoritis dilakukan untuk membandingkan teori dasar mengenai dampak lingkungan dengan temuan penelitian di Desa Wadas. Analisis konten dilakukan untuk menjelaskan perbandingannya. Pembangunan bendungan berdampak signifikan terhadap perubahan morfologi aliran sungai, biodiversitas lingkungan, ekologi, vegetasi, hingga polusi (Li et al., 2020). Penambangan batu andesit untuk material pembangunan bendungan juga memiliki dampak negatif sebagaimana dampak lingkungan secara umum dari pertambangan seperti kerusakan vegetasi dan dampak secara tidak langsung seperti emisi karbon dari kerusakan vegetasi tersebut (Li et al., 2024).

Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak lingkungan yang menjadi temuan di Desa Wadas berbanding lurus dengan teori dasar. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk lebih memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan dan melakukan mitigasi. Perhatian pemerintah dapat diaplikasikan dengan pembentukan penegak hukum di bidang lingkungan maupun pembentukan dan penegakan regulasi mengenai pelestarian lingkungan (Andriansyah et al., 2021).



Gambar 5. Bagan Dialog Teoritis Dampak Lingkungan Desa Wadas

3.1.2. Sosial

Sikap pemerintah yang memilih jalur opresi terhadap kelompok masyarakat Desa Wadas memicu konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah. Konflik sosial antara warga Desa Wadas dengan pemerintah memanas pada Februari 2022, di mana terjadi pengejaran dan penangkapan sejumlah warga Desa Wadas oleh aparat kepolisian (Romadlan & Fauziah, 2022). Kejadian ini mengarah kepada dugaan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian saat melakukan pengukuran tanah yang mengakibatkan sebagian warga belum bisa kembali ke Desa Wadas dan trauma psikis pada perempuan dan anak di Desa Wadas (Komnas HAM, 2022).

Langkah yang diambil oleh pemerintah dalam penyelesaian permasalahan konflik sosial vertikal diduga justru mengakibatkan munculnya konflik horizontal. Warga Desa Wadas menduga pemerintah melakukan negosiasi dan memberi bantuan kepada sebagian warga lainnya agar mereka menyetujui pertambangan andesit di Desa Wadas. Hal ini dapat menyebabkan kelompok masyarakat Desa Wadas terpecah dan saling berkonflik antara masyarakat pro dan kontra kegiatan pertambangan. Salah satu warga Desa Wadas menyerukan agar Desa Wadas berhati-hati dan waspada akan taktik pemerintah ini.



Sumber: Wadas Melawan, 2023

Gambar 6. Ajakan Warga Desa Wadas untuk berhati-hati dan Waspada

Dialog teoritis dilakukan untuk membandingkan teori dasar mengenai dampak sosial dengan temuan penelitian di Desa Wadas. Pembebasan lahan untuk bendungan yang berujung pada relokasi cenderung menimbulkan konflik vertikal dan horizontal antar masyarakat (Amalia & Malihah, 2016). Selain konflik, relokasi juga sering mengakibatkan trauma negatif terhadap masyarakat yang menjadi korban relokasi (Dekel & Tuval-Mashiach, 2012). Hal ini disebabkan ketakutan akan perlunya adaptasi di lingkungan baru (Christersson et al., 2017).

Tabel 2. Dialog Teoritis Dampak Sosial Desa Wadas

Teori Dasar	Temuan Penelitian	Analisis	Solusi
Relokasi cenderung menimbulkan konflik vertikal dan horizontal (Amalia & Malihah, 2016).	Terjadi konflik vertikal dan horizontal di Desa Wadas yang terdampak pembangunan Bendungan Bener.	Kejadian yang ada di Desa Wadas menunjukkan konflik vertikal dan horizontal yang terjadi diakibatkan oleh perlakuan aparat yang represif dan penanganan konflik dari pemangku kepentingan yang tidak humanis terhadap masyarakat terdampak.	Solusi yang bisa dilakukan di Desa Wadas adalah pelaksanaan manajemen konflik yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara humanis dengan meminimalisir kerugian yang akan diterima oleh masyarakat.
Relokasi dan konflik bisa menimbulkan dampak traumatis (Dekel & Tuval-Mashiach, 2012).			
Masyarakat terdampak cenderung takut akan lingkungan baru dan bisa berdampak trauma (Christersson et al., 2017).	Masyarakat di Desa Wadas trauma akibat pengejaran dan penangkapan oleh aparat kepolisian.		

Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak sosial yang menjadi temuan di Desa Wadas berbanding lurus dengan teori dasar. Mitigasi konflik sosial perlu dilakukan oleh pemerintah jika ingin melaksanakan Proyek Strategis Nasional. Sosialisasi dan musyawarah perlu dilakukan secara humanis untuk mencegah eskalasi konflik sosial di Desa Wadas.

3.1.3. Ekonomi

Pada bulan November 2022, komunitas GEMPADEWA di akun media sosialnya menerbitkan perhitungan prediksi kondisi ekonomi Desa Wadas jika penambangan terus dilakukan. Valuasi ekonomi Desa Wadas pada tahun 2021 adalah 426,3 Miliar. Berdasarkan proyeksi valuasi ekonomi dengan fokus utama pertanian, dapat diasumsikan pertumbuhan ekonomi Desa Wadas akan terus berkembang setiap tahunnya. Prediksi valuasi ekonomi Desa Wadas pada tahun 2030 adalah Rp852 Miliar dan pada tahun 2050 mencapai 3,92 triliun (Wadas Melawan, 2022). Dari perhitungan dan prediksi ini, warga Desa Wadas sudah sejahtera tanpa kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan ini justru mengancam stabilitas ekonomi di Desa Wadas.

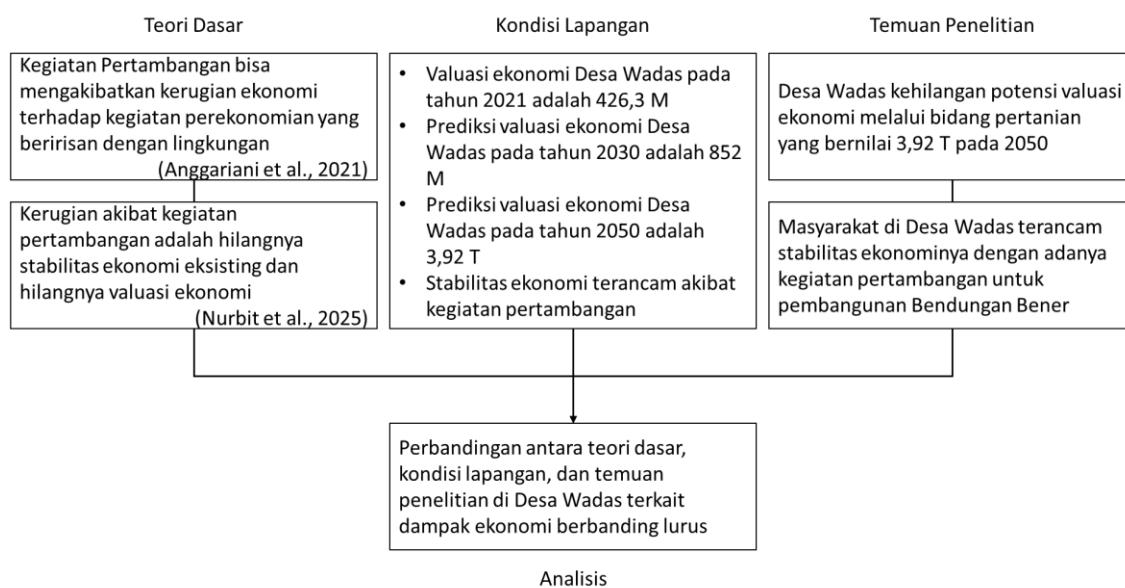
Meski permasalahan Desa Wadas dianggap selesai oleh beberapa pihak, masyarakat Desa Wadas yang tergabung menyatakan perjuangan masyarakat belum selesai. Masyarakat masih berusaha menggugat pemaksaan tambang di Desa Wadas. Hal ini menunjukkan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah belum cukup melindungi kesejahteraan masyarakat Desa Wadas. Selain itu, penurunan valuasi ekonomi di Desa Wadas juga menjadi dasar gugatan warga.



Sumber: Wadas Melawan, 2024

Gambar 7. Dokumentasi Gugatan Warga Desa Wadas

Dialog teoritis dilakukan untuk membandingkan teori dasar mengenai dampak ekonomi dengan temuan penelitian di Desa Wadas. Kegiatan pertambangan yang berada di kawasan ekonomi masyarakat bisa mengakibatkan kerugian ekonomi berupa terganggunya ekosistem perekonomian, terutama jika kegiatan perekonomian masyarakat beririsan dengan lingkungan (Anggariani et al., 2021). Kegiatan pertambangan sendiri biasanya memberikan keuntungan ekonomi langsung dan jangka pendek melalui ganti rugi lahan, namun jika masyarakat lebih berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek tersebut maka akan mengalami kerugian ekonomi dengan valuasi yang lebih besar karena hilangnya keberlanjutan kegiatan perekonomian mereka (Nurbit et al., 2025).



Gambar 8. Bagan Dialog Teoritis Dampak Ekonomi Desa Wadas

Hasil analisis menunjukkan bahwa hasil penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi dasar teori dan temuan penelitian ini berbanding lurus di mana masyarakat Desa Wadas kehilangan stabilitas ekonomi di wilayahnya. Pemerintah perlu mengkaji ulang dampak ekonomi yang terjadi di Desa Wadas akibat dari Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener. Hal ini bisa dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

3.2. Yogyakarta International Airport, Kulon Progo, DI Yogyakarta

Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo telah selesai dan mulai beroperasi sejak tahun 2020. Proses perencanaan pembangunan yang dimulai sejak tahun 2011 ini melewati banyak permasalahan dengan kelompok masyarakat di kawasan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. Konflik ini sebagian besar merujuk kepada konflik lahan yang dialih-fungsikan sebagai bandara.

3.2.1. Lingkungan

Penggunaan lahan di lokasi pengadaan tanah pada tahun 2015 sebelum dimulainya pembangunan bandara YIA merupakan lahan sawah sebesar 41% (Utami et al., 2023). Alih fungsi lahan dari pertanian menjadi lahan terbangun yang memiliki kemampuan infiltrasi rendah berpotensi merubah koefisien limpasan permukaan. Hal ini mengakibatkan risiko genangan atau banjir lokal di wilayah tersebut dikarenakan saluran drainase tidak mampu menahan jumlah debit limpasan ketika tingkat curah hujan tinggi (Kelana et al., 2019).

Hasil analisis konten menunjukkan pembangunan bandara YIA berpotensi mengakibatkan risiko bencana lingkungan. Hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan mitigasi risiko bencana tersebut dengan perencanaan yang lebih ramah lingkungan. Penerapan green infrastructure bisa menjadi alternatif perencanaan berbasis keberlanjutan lingkungan di bandara YIA.



Sumber: Google Earth

Gambar 9. Perubahan Penggunaan Lahan Wilayah Pembangunan Bandara YIA

3.2.2. Sosial

Privatisasi lahan menjadi salah satu pemicu konflik agraria yang melibatkan kelompok rentan di Kulon Progo, D. I. Yogyakarta (Kustiningsih, 2017). Masyarakat yang menolak pembangunan Bandara YIA tergabung dalam Kelompok Wahana Tri Tunggal, yang terdiri dari petani dan pekerja tani, sementara kelompok masyarakat yang mendukung pembangunan bandara sebagian besar terdiri dari pemilik lahan (Sopanudin, 2016). Perpecahan masyarakat yang pro dan kontra terhadap pembangunan berakhir dengan timbulnya konflik sosial horizontal.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan bandara YIA menimbulkan konflik sosial. Pemerintah perlu melakukan tindakan dan intervensi untuk meredam konflik yang berazas keadilan. Konflik horizontal perlu ditanggulangi dan penyelesaian konflik yang berazas keadilan merupakan penyelesaian konflik yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan pada pembangunan bandara YIA.

3.2.3. Ekonomi

Penolakan masyarakat terhadap pembangunan Bandara YIA didasari kekhawatiran berkurang atau hilangnya lahan mata pencaharian penduduk yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. Kelompok rentan dalam pembangunan ini adalah petani penggarap yang tidak memiliki lahan dan tidak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi dari hilangnya mata pencaharian mereka. Proses pembangunan yang menggandeng sektor asing dan privatisasi lahan mengindikasi perubahan kebijakan pro rakyat menjadi pasar bebas (Kustiningsih, 2017). Dalam jangka panjang, kebijakan ini akan sangat merugikan masyarakat rentan terutama di bidang ekonomi.

Hasil analisis menunjukkan adanya dampak ekonomi terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan bandara YIA. Pemerintah perlu memberikan solusi terkait mata pencaharian masyarakat, khususnya di bidang pertanian, agar masyarakat bisa mendapatkan stabilitas ekonomi. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi dampak ekonomi ini.

3.3. Tol Tanggul Laut Semarang-Demak, Jawa Tengah

Pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD) merupakan pembangunan infrastruktur yang diharapkan menjadi solusi permasalahan banjir dan rob pada wilayah Kaligawe (Semarang) - Sayung (Demak). Pembangunan Proyek Strategis Nasional ini tengah berada di tahap pertama dengan rencana pembangunan jalan tol sepanjang 10,64 km. Jadwal pembangunan TTLSD ini mundur dari target awal yang rencananya akan mulai dibangun pada tahun 2019 dan beroperasi pada tahun 2021. Mundurnya rencana pembangunan memberi waktu kepada peneliti, lembaga swadaya masyarakat dan penduduk setempat untuk menganalisis kembali dokumen perencanaan dan prediksi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Kelompok yang aktif mengkritisi dan memberi pembaharuan berita tentang dampak dari proses pembangunan TTLSD tergabung dalam Koalisi Peisisir Semarang-Demak (Maleh Dadi Segoro), yang terdiri dari Rujak Center for Urban Studies, Yayasan Amerta Air Indonesia, Sustainable Development Research Center at the Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, LBH Semarang, DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Semarang, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), WALHI Jawa Tengah, Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Komunitas Pekakota, Ekologi Maritim Indonesia (EKOMARIN) dan Program Magister Lingkungan dan Perkotaan Unika Soegijapranata (<https://twitter.com/malehdadisegoro>, 2024).

Koalisi Peisisir Semarang-Demak pada tahun 2020 menerbitkan buku berjudul "Maleh Dadi Segoro: Krisis Sosial-Ekologis Kawasan Pesisir Semarang-Demak". Dalam buku ini, tim koalisi membahas tentang krisis sosial-ekologis di kawasan pesisir Semarang-Demak dan membedah Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) proyek pembangunan TTLSD. Koalisi Peisisir Semarang-Demak menemukan enam kelemahan ANDAL proyek pembangunan ini meski menurut pemerintah, rencana proyek sudah sesuai dengan dokumen peraturan perencanaan lainnya.

3.3.1. Lingkungan

Permasalahan utama di pesisir utara Pulau Jawa adalah banjir dan rob akibat penurunan muka air tanah yang disebabkan oleh beratnya beban aktivitas di wilayah pesisir. Maraknya pembangunan kawasan industri di pesisir utara Jawa Tengah juga menjadi salah satu penyebab abrasi dan hilangnya lahan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan laut dan tambak. Pembangunan TTLSD direncanakan akan menghubungkan Kawasan Industri Kendal dengan Jateng Industrial Park di Sayung, Demak (Bosman, 2020).

Hal ini kontradiktif dengan rencana pembangunan TTLSD yang bertujuan untuk mengurangi dampak banjir rob namun tidak mengurangi beban lahan pesisir yang menyebabkan muka air tanah terus menurun.



Sumber: Google Earth

Gambar 10. Lokasi Kawasan Industri Kendal dan Jateng Industrial Park, Sayung, Demak

Menurut unggahan akun media sosial Koalisi Pesisir Semarang-Demak (@malehdadisegoro), warga Sayung Lor di Kabupaten Demak mengeluhkan kenaikan tinggi banjir rob sejak dimulainya pembangunan TTLSD. Genangan rob di Desa Bendono juga mencapai tinggi teras rumah warga. Koalisi Pesisir Semarang-Demak menemukan beberapa titik di Desa Purwosari di mana tambak milik warga mulai tenggelam sejak tiang pancang TTLSD ditanam. Hal ini membenarkan prediksi Koalisi Pesisir Semarang-Demak yang menggunakan istilah “Maleh Dadi Segoro” yang merupakan bahasa Jawa dari “Berubah Menjadi Lautan”.

Hasil analisis menunjukkan adanya dampak lingkungan dari TTLSD berupa kenaikan banjir rob. Pemerintah perlu melakukan kajian mengenai relokasi masyarakat yang terdampak dengan memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat. Selain itu perlu adanya strategi berbasis lingkungan untuk mengatasi banjir rob yang semakin tinggi di lokasi TTLSD.

3.3.2. Sosial

Rencana perubahan lahan untuk pembangunan TTLSD menimbulkan konflik yang sama dengan Proyek Strategis Nasional lainnya, yaitu konflik lahan. Dalam kasus proyek pembangunan TTLSD, lahan yang teridentifikasi akan berkurang berupa lahan tambak, pertanian, dan permukiman. Kesiapan masyarakat untuk beralih dari kehidupan berbasis agrarian dan maritim di setiap wilayah berbeda-beda. Sebagian masyarakat yang lahan tambak maupun pertaniannya telah rusak akibat aktivitas industri lebih siap dan merelakan lahannya untuk pembangunan TTLSD (Biruni & Kurniawati, 2021).

Menurut situs pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada bulan Desember 2023, warga Kecamatan Genuk, Kota Semarang menerima dana ganti rugi atas lahan tambak yang akan digunakan untuk proyek pembangunan TTLSD (Kementerian PUPR, 2023). Namun permasalahan ganti rugi kepada pemilik lahan tidak dirasakan oleh seluruh warga yang lahannya dibutuhkan oleh pemerintah untuk membangun proyek TTLSD. Koalisi Pesisir Semarang-Demak mengunggah kasus sengketa lahan yang dialami oleh petani asal

Desa Pulosari, Kabupaten Demak pada tahun 2022 di mana terjadi pemaksaan terhadap pemilik lahan agar menjual lahan sumber mata pencahariannya tersebut (<https://twitter.com/malehdadisegoro>, 2022). Kasus sengketa lahan dan pemaksaan pelepasan lahan sumber mata pencaharian warga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Hasil analisis konten menunjukkan terdapat permasalahan sosial berupa tidak meratanya ganti rugi yang didapatkan oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan permasalahan baru berupa sengketa lahan. Pemerintah dan masyarakat perlu melaksanakan diskusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan langkah-langkah dengan kaidah keadilan dan keberpihakan terhadap masyarakat. Pemerintah perlu menginisiasi langkah tersebut untuk menunjukkan itikad baik dalam penyelesaian masalah dengan masyarakat.

3.3.3. Ekonomi

Pembangunan TTLSD yang menghubungkan kawasan-kawasan industri di pesisir Jawa Tengah dan pengembangan properti terindikasi menggunakan model pembangunan kapitalis yang identik dengan perekonomian pasar bebas yang dikuasai oleh pihak swasta. Dalam hal ini, pemerintah lebih mementingkan keuntungan dan pemasukan daerah dari pihak swasta daripada keberlanjutan hidup masyarakat agraria dan maritim. Model pembangunan kapitalistik ini kontradiktif dengan agenda pemerintah yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Bosman, 2020).

Meskipun kerugian atas pembebasan lahan untuk pembangunan TTLSD diberikan ke masyarakat, kurangnya edukasi pemerintah untuk mengolah dana tersebut dapat memperburuk ekonomi warga dalam jangka panjang. Dokumen ANDAL proyek pembangunan TTLSD pun tidak membahas mengenai solusi untuk masyarakat yang akan kehilangan pekerjaan akibat pembangunan TTLSD. Selain risiko akibat berkurangnya lahan sumber mata pencaharian masyarakat, ada pula kerugian yang akan dialami oleh para nelayan kecil dan tradisional. Hal ini disebabkan TTLSD akan memblokade jalur para nelayan untuk melaut.

Hasil analisis menunjukkan dampak ekonomi yang mirip dengan Proyek Strategis Nasional lainnya, yakni berkurangnya lahan sumber mata pencaharian masyarakat. Pemerintah perlu merencanakan strategi ekonomi yang berkelanjutan dengan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang terdampak, termasuk namun tidak terbatas pada peningkatan keahlian masyarakat yang terdampak dengan tujuan menciptakan stabilitas ekonomi bagi masyarakat.

3.4. Smelter Nikel Morowali, Sulawesi Tengah

Pembangunan smelter Morowali adalah salah satu program di Proyek Strategis Nasional yang merupakan tanggungjawab Kementerian Perindustrian. Wilayah penambangan nikel di Morowali sebelumnya merupakan wilayah penambangan saja (Lampe, 2021). Melalui pembangunan PT. Indonesia Morowali Industrial Park dan Proyek Strategis Nasional, kawasan ini dikembangkan menjadi smelter pengolah nikel dan produk turunannya. Pembangunan smelter nikel ini telah dinyatakan selesai pada tahun 2018 (KPPNP, 2018).

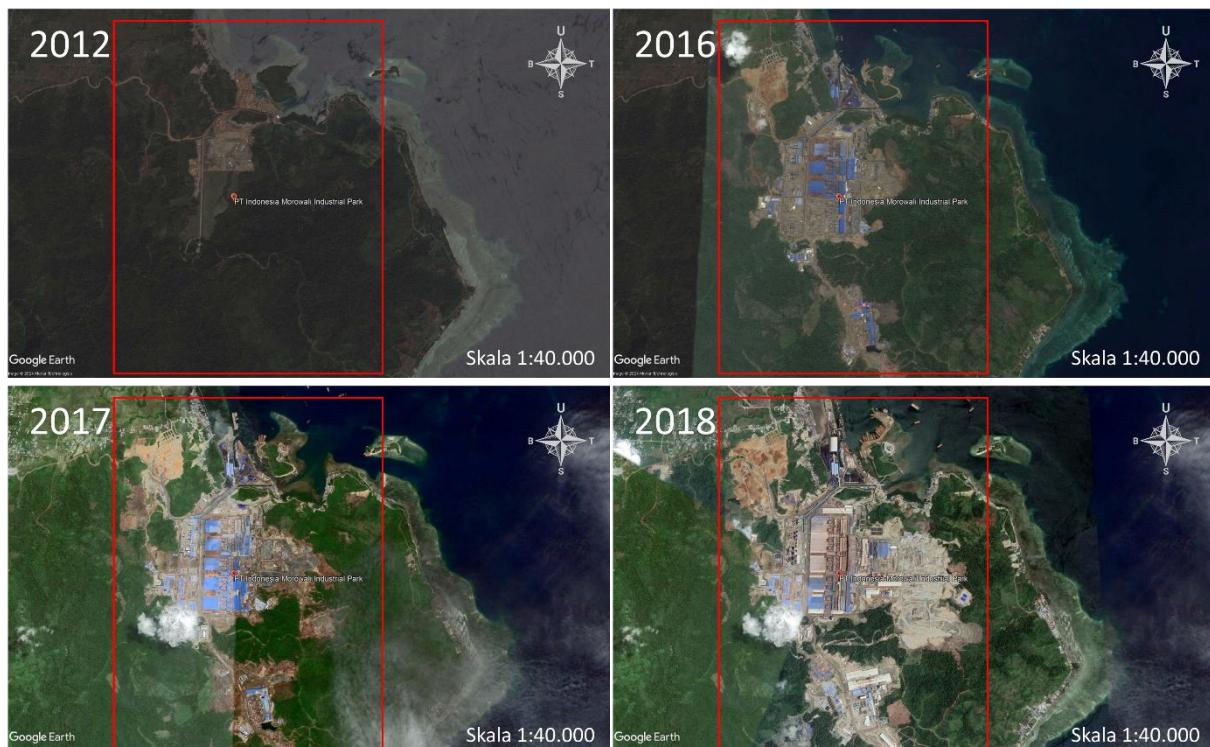
Nikel merupakan salah satu komponen dari baterai kendaraan listrik. Sebelumnya, Indonesia hanya mengekspor nikel mentah dan hal tersebut dianggap merugikan perekonomian bangsa. Pembangunan smelter nikel akhirnya menjadi solusi yang diambil pemerintah. Namun, ambisi pemerintah untuk mempercepat hilirisasi nikel di Indonesia banyak memberikan dampak negatif. Industrialisasi yang dipercepat tanpa pertimbangan yang matang dan lebih mengedepankan kepentingan pihak asing mengakibatkan kerugian di lingkungan sekitar dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Morowali.

3.4.1. Lingkungan

Dukungan terhadap konversi ke energi bersih yang membutuhkan bahan baku nikel mengorbankan hutan dan laut di Morowali. Kawasan industri yang menjadi basis 20 perusahaan tambang di Morowali adalah PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Pembuangan limbah nikel dari 20 perusahaan di IMIP yang kurang optimal menjadikan wilayah maritim di Kabupaten Morowali tercemar logam berat dan merusak

ekosistem laut (Syarifuddin, 2022). Menurut penelitian Lestari et al. (2024), kadar nikel dan besi di perairan Desa Fatufia, Kabupaten Morowali lebih tinggi dari standar baku mutu terendah. Selain mencemari perairan, logam nikel dan besi juga mengendap pada sedimen dan dapat menyebabkan terjadinya proses bioakumulasi di mana kandungan logam terkonsentrasi di dalam tubuh makhluk hidup (Lestari et al., 2024).

Limbah yang dihasilkan PT. IMIP tidak hanya berupa logam, namun juga dari limbah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang mensuplai listrik di kawasan industri tersebut. Deforestasi kawasan sekitar smelter yang masif dalam 10 tahun terakhir juga mempengaruhi lingkungan sekitar sehingga tutupan hutan semakin tergerus (Syarifuddin, 2022). Permasalahan-permasalahan lingkungan yang muncul setelah tahun 2018 ini menunjukkan bahwa pembangunan smelter nikel di Morowali tidak hanya mencemari lautan, tetapi juga tanah dan udara.



Sumber: Google Earth

Gambar 11. Perkembangan Kawasan Industri PT IMIP

Hasil analisis konten menunjukkan adanya dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan kawasan industri PT. IMIP. Masyarakat terdampak polusi yang mencemari laut, tanah, dan udara di tempat mereka hidup. Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat mengenai kegiatan industri ini dengan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencemaran ini. Hal ini bisa dipandang sebagai iktikad baik pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

3.4.2. Sosial

Perkembangan smelter nikel di Morowali mengundang minat banyak pendatang untuk mengadu nasib di wilayah ini. Meningkatnya jumlah para pendatang untuk bekerja di smelter nikel Morowali meningkatkan potensi konflik sosial di masyarakat. Pekerja yang datang tidak hanya dari Indonesia, namun juga dari Tiongkok. Adanya ketimpangan baik dalam jumlah gaji dan diskriminasi menyebabkan protes berkepanjangan dari warga, karyawan dan buruh lokal (Lampe, 2021).

Masalah lain yang sering menjadi sorotan adalah tentang keselamatan pekerja di industri tambang nikel. Pada bulan Desember 2023, terjadi ledakan tungku smelter nikel yang menewaskan 13 orang. Kecelakaan kerja ini bukan yang pertama kalinya (Arman, 2023).

Hasil analisis konten menunjukkan bahwa terdapat konflik sosial antara pekerja Indonesia dengan pekerja Tiongkok yang didasari oleh ketimpangan jumlah gaji dan diskriminasi. Selain itu adanya isu keselamatan kerja juga menjadi masalah sosial lain yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai regulator perlu membuat regulasi strategis untuk menyetarakan ketimpangan jumlah gaji dan diskriminasi, sehingga permasalahan antara pekerja Indonesia dengan pekerja Tiongkok bisa diredam. Regulasi keselamatan kerja juga perlu diperhatikan oleh pemerintah agar para pekerja bisa nyaman dalam bekerja.

3.4.3. Ekonomi

Harapan pemerintah dalam membangun smelter nikel di Morowali salah satunya adalah dapat meningkatkan ekonomi. Namun sebanyak 95% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibawa keluar dari Kabupaten Morowali. Hal ini disebabkan investor dari pertambangan dan smelter nikel di Morowali berasal dari Tiongkok (CNN Indonesia, 2023).

Pendapatan warga Morowali juga menjadi masalah ketika gaji yang diterima oleh pekerja migran asal Tiongkok berjumlah 7-10 kali lipat dari gaji pekerja lokal (Lampe, 2021). Tidak hanya pekerja tambang dan smelter, masyarakat yang bergantung pada agraria dan maritim ikut merasakan dampak ekonomi dari perkembangan kawasan industri nikel di Morowali. Sumber daya alam di pesisir yang rusak mengakibatkan pendapatan para nelayan berkurang. Nelayan juga harus melaut lebih jauh untuk menangkap ikan (Syarifuddin, 2022). Lahan pertanian dan perkebunan penduduk setempat mulai tercemar limbah dan mengalami kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan sejak berdirinya PT IMIP (Lampe, 2021).

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat dampak ekonomi yang negatif terhadap masyarakat. Harapan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi Morowali tidak tercapai karena mayoritas keuntungan ekonomi dibawa keluar dari Morowali. Selain itu masyarakat lokal juga tidak banyak mendapatkan keuntungan ekonomi di mana justru pekerja dari Tiongkok yang mendapatkan lebih banyak keuntungan ekonomi, begitu pula dengan nelayan dan petani yang mata pencahariannya terganggu akibat dari polusi. Pemerintah perlu memberikan jaminan keamanan dan stabilitas ekonomi bagi masyarakat lokal yang terdampak. Regulasi jumlah gaji perlu diberikan agar masyarakat lokal lebih bisa merasakan keuntungan ekonomi dari smelter nikel. Ketegasan di bidang lingkungan juga perlu diperhatikan oleh pemerintah agar nelayan dan petani lokal yang mata pencahariannya terganggu akibat polusi bisa bangkit dan mendapatkan stabilitas ekonomi juga.

Tabel 3. Temuan Penelitian

No.	Proyek	Lingkungan	Sosial	Ekonomi
1	Bendungan Bener	Terdapat ancaman ketahanan lingkungan Desa Wadas akibat penambangan batu andesit untuk Bendungan Bener karena adanya penggundulan hutan yang mengakibatkan ancaman bencana banjir dan longsor.	Terdapat konflik vertikal dan horizontal karena perlakuan aparat yang represif dan penanganan konflik dari pemangku kepentingan yang tidak humanis terhadap masyarakat terdampak.	Terdapat valuasi ekonomi yang menghilang di Desa Wadas akibat dari kegiatan pertambangan. Prediksi hilangnya valuasi ekonomi di Desa Wadas dari bidang pertanian di tahun 2050 adalah 3,92 T.
2	Bandara YIA	Terdapat alih fungsi lahan pertanian sebesar 41% untuk pembangunan bandara YIA, sehingga menurunkan	Terdapat konflik horizontal antar masyarakat terkait dengan Pembangunan bandara YIA. Konflik tersebut	Terdapat petani sebagai kelompok rentan yang kehilangan mata pencaharian. Hal ini

No.	Proyek	Lingkungan	Sosial	Ekonomi
		kemampuan infiltrasi yang mengakibatkan risiko genangan atau banjir lokal di wilayah tersebut.	terjadi antara kelompok Wahana Tri Tunggal yang berprofesi sebagai petani dengan kelompok masyarakat yang mendukung pembangunan bandara YIA yang terdiri dari pemilik lahan.	mengakibatkan terganggunya stabilitas ekonomi masyarakat.
3	Tol Tanggul Laut	Terdapat penurunan muka air tanah di kawasan pesisir yang disebabkan beratnya beban aktivitas di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan abrasi yang menghilangkan mata pencaharian nelayan laut dan tambak.	Terdapat permasalahan ganti rugi kepada pemilik lahan tidak dirasakan oleh seluruh warga yang lahannya dibutuhkan oleh pemerintah untuk membangun proyek TTLSD. Koalisi Pesisir Semarang-Demak mengunggah kasus sengketa lahan yang dialami oleh petani asal Desa Pulosari, Kabupaten Demak pada tahun 2022 di mana terjadi pemaksaan terhadap pemilik lahan agar menjual lahan sumber mata pencahariannya tersebut.	Terdapat beberapa hal terkait ekonomi yang menjadi kajian seperti kurangnya edukasi pemerintah untuk mengolah dana ganti rugi sehingga dapat memperburuk ekonomi warga dalam jangka panjang dan belum ada yang membahas mengenai solusi untuk masyarakat yang akan kehilangan pekerjaan akibat pembangunan TTLSD.
4	Smelter Morowali	Terdapat pencemaran air dan udara akibat aktivitas smelter nikel di Morowali. Selain itu terdapat deforestasi kawasan sekitar smelter yang berpengaruh terhadap kawasan sekitarnya.	Terdapat konflik sosial antara pekerja Indonesia dengan pekerja Tiongkok yang didasari oleh ketimpangan jumlah gaji dan diskriminasi. Selain itu terdapat juga isu keselamatan kerja yang belum diregulasi secara baik oleh pemerintah.	Terdapat kerugian ekonomi yang ada di Morowali karena mayoritas keuntungan ekonomi dibawa keluar dari Morowali. Selain itu masyarakat lokal juga tidak banyak mendapatkan keuntungan ekonomi di mana justru pekerja dari Tiongkok yang mendapatkan lebih banyak keuntungan ekonomi.

Dampak negatif yang muncul meliputi degradasi lingkungan berupa deforestasi, pencemaran, dan peningkatan risiko bencana; persoalan sosial seperti konflik agraria, penggusuran, serta marginalisasi komunitas adat, perempuan, dan nelayan; serta persoalan ekonomi berupa hilangnya mata pencaharian, ketidakadilan kompensasi, dan distribusi manfaat pembangunan yang timpang. Temuan ini menegaskan bahwa prinsip inklusivitas, keadilan sosial, dan perlindungan kelompok rentan belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan PSN.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan berkelanjutan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap kelompok rentan. Studi kasus Bendungan Bener, Bandara Internasional Yogyakarta, Tol Tanggul Laut Semarang-Demak, dan Smelter Nikel Morowali menunjukkan bahwa meskipun PSN digagas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas, implementasinya masih memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Kesenjangan antara tujuan normatif pembangunan berkelanjutan dan realitas implementasi di lapangan memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur berskala nasional masih lebih menekankan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dibandingkan keberlanjutan sosial-lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak direncanakan secara holistik justru berpotensi melahirkan kerentanan baru dan memperlebar ketimpangan sosial. Pembangunan berkelanjutan seharusnya diposisikan sebagai instrumen untuk menjamin keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan, bukan semata sebagai sarana akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan instrumen kajian dampak sosial-lingkungan yang lebih komprehensif dan mengikat secara hukum, termasuk integrasi *social safeguard* dalam setiap tahapan PSN. Pemerintah perlu menegakkan regulasi mengenai dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dihasilkan dari proyek-proyek tersebut. Partisipasi publik harus ditingkatkan, terutama bagi kelompok rentan, agar suara mereka terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah perlu mengadakan musrenbang secara komprehensif untuk mewadahi aspirasi dari masyarakat yang terdampak. Mekanisme kompensasi dan relokasi juga perlu diperbaiki dengan standar yang adil, transparan, dan berbasis pada pemulihan mata pencaharian, bukan sekadar ganti rugi finansial. Selain itu, distribusi manfaat pembangunan harus dirancang lebih merata dengan menempatkan prinsip keadilan sosial sebagai dasar. Dengan langkah-langkah tersebut, PSN dapat berkembang tidak hanya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

5. REFERENSI

- Amalia, M., & Malihah, E. (2016). Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede Di Desa Wado. *Sosietas*, 6(2). DOI: <https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i2.4248>.
- Andriansyah, Sulastri, E., & Satispi, E. (2021). The Role of Government Policies in Environmental Management. *Research Horizon*, 1(3), 86–93.
- Anggariani, D., Sahar, S., & Sayful, M. (2021). Tambang Pasir dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai. *SIGn Journal of Social Science*, 1(1), 15–29. DOI: <https://doi.org/10.37276/sjss.v1i1.96>.
- Arman, R. (2023). Ledakan Tungku Smelter di Morowali, 13 Orang Tewas dan 38 Korban Luka - *Kompas.id*. Kompas.Id. Retrieve from <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/12/24/13-meninggal-38-luka-dalam-ledakan-tungku-smelter-di-morowali>.
- Bappenas. (2023). Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Retrieve from <https://www.bappenas.go.id/id/berita/rancangan-akhir-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-2025-2045-YohFL>.
- Bappenas. (2020). Rpjmn 2020-2024. *National Mid-Term Development Plan 2020-2024*, 313. Retrieve from <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan...dan.../rpjmn-2015-2019/>.
- Biruni, E. S. M., & Kurniawati, W. (2021). Tingkat Kesiapan Masyarakat Kecamatan Sayung Terhadap Rencana Pengintegrasian Pembangunan Tanggul Laut Dengan Jalan Tol Semarang-Demak. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 10(2), 117–126. DOI: <https://doi.org/10.14710/tpwk.2021.30798>.
- Bosman. (2020). Maleh dari segoro: krisis sosial-ekologis kawasan pesisir Semarang-Demak: koalisi pesisir Semarang-Demak. *Lintas Nalar*.
- Cham, S. (2023). Sustainable Development Adalah: Pengertian Dan 3 Pilarnya. Indonesia Sustainability 4.0 Network. Retrieve from <https://indonesiasustainability.com/sustainable-development-adalah/>.
- Christersson, M., Heywood, C., & Rothe, P. (2017). Social impacts of a short-distance relocation process and new ways of working. *Journal of Corporate Real Estate*, 19(4), 265–284. DOI: <https://doi.org/10.1108/JCRE-02-2016-0008>.
- CNN Indonesia. (2023). Ada Industri Nikel, 95 Persen Pendapatan Daerah Morowali Justru Keluar. Retrieve from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230925195201-92-1003595/ada-industri-nikel-95-persen-pendapatan-daerah-morowali-justru-keluar>.
- Coe, K., & Scacco, J. M. (2017). Content Analysis, Quantitative. *The International Encyclopedia of Communication Research Methods*, 1–11. DOI: <https://doi.org/10.1002/978118901731.iecrm0045>.
- Dekel, R., & Tuval-Mashiach, R. (2012). Multiple losses of social resources following collective trauma: The case of the forced relocation from Gush Katif. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 4(1), 56–65. DOI: <https://doi.org/10.1037/a0027311>.

- <https://doi.org/10.1037/a0019912>.
- Department of Economic and Social Affairs of United Nation. (2022). THE 17 GOALS, Sustainable Development. Sustainable Development. Retrieve from <https://sdgs.un.org/goals>.
- Erwianto, W. I. (2017). Tantangan Pembangunan Infrastruktur Dalam Proyek Strategis Nasional Indonesia. Prosiding Simposium II – UNIID 2017, 978–979.
- Hafizyar, R., & Dheyaaldin, M. H. (2019). Concrete Technology and Sustainably Development from Past to Future. Sustainable Structure and Materials, 2(1), 1–13. DOI: <https://doi.org/10.26392/SSM.2019.02.01.001>.
- Hidajat, K. (2021). Kasus Desa Wadas Pembangunan Bendungan Bener Perspektif SDG's Desa. *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*, 1(1), 1–8. DOI: <https://doi.org/10.52447/jpn.v1i1.5470>.
- IISD. (2020). Sustainable Development - Sustainable Development Fund. International Institute for Sustainable Development. Retrieve from <https://www.iisd.org/topic/sustainable-development>.
- Kelana, A., Kamulyan, B., & Supraba, I. (2019). Kajian Peningkatan Genangan Akibat Perubahan Tata Guna Lahan Dari Mega Proyek Yogyakarta International Airport. Seminar Nasional Pascasarjana, Departemen Teknik Sipil FT-UI, 363–372.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara. (2021). Proyek Strategis Nasional BUMN. Bumn.Go.Id. Retrieve from <https://bumn.go.id/investor/project/PT Wijaya Karya %28Persero%29 Tbk>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, 1(2022).
- Kementerian PUPR. (2023). Tanggul Laut Pada Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Seksi 1 Sepanjang 10,64 Km Upaya Atasi Banjir Rob di Kabupaten Demak. Pu.Go.Id. Retrieve from <https://pu.go.id/berita/tanggul-laut-pada-pembangunan-jalan-tol-semarang-demak-seksi-1-sepanjang-1064-km-upaya-atasi-banjir-rob-di-kabupaten-demak>
- Komnas HAM. (2022). Dugaan Kekerasan di Wadas, Komnas HAM Sampaikan Temuan Awal. Retrieve from <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/2/14/2079/dugaan-kekerasan-di-wadas-komnas-ham-sampaikan-temuan-awal.html>.
- KPPIP. (2018). Laporan KPPIP tahun 2018.
- KPPIP. (2022). Laporan KPPIP Semester II 2022. 1–94. Retrieve 10 Desember 2023 from https://drive.google.com/file/d/15axV9FmKLnpHAr14Ds__iPcdFPpuAtL/view.
- Kustiningsih, W. (2017). Kelompok Rentan dalam Pembangunan Kawasan Kota Bandara di Kulon Progo: Studi Kasus New Yogyakarta International Aiport (NYIA). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(1), 91–105. DOI: <https://doi.org/10.22146/jps.v4i1.23632>.
- Lampe, I. (2021). Isu-isu industrialisasi nikel dan pengelolaan komunikasi korporat di kawasan industri Morowali. *PRofesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(1), 1–22. DOI: <https://doi.org/10.24198/prh.v6i1.30603>.
- Lestari, D. W., Umar, M. R., & Priosambodo, D. (2023). Analisis kadar nikel dan besi pada sedimen perairan pesisir Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. *Bioma: Jurnal Biologi Makassar*, 6(2), 119–127.
- Li, N., Guo, Y., Wang, L., Wang, Q., Yan, D., Zhao, S., & Lei, T. (2024). Evaluation and quantitative characterization for the ecological environment impact of open pit mining on vegetation destruction from landsat time series: A case study of Wulishan limestone mine. *Ecological Indicators*, 158, 111371. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.111371>.
- Li, W., Li, Z. K., Ge, W., & Zhang, H. (2020). Environmental impact evaluation model of dam breach — Considering the uncertainty feature of environment. *Desalination and Water Treatment*, 183, 131–138. DOI: <https://doi.org/10.5004/dwt.2020.25205>.
- Limanseto, H. (2023). Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan, Pemerintah Wujudkan Proyek Strategis Nasional yang Miliki Manfaat Besar dan Berdampak Luas. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Retrieve from [https://ekon.go.id/publikasi/detail/5407/libatkan-seluruh-pemangku-kepentingan-pemerintah-wujudkan-proyek-strategis-nasional-yang-miliki-manfaat-besar-dan-berdampak-luas#:~:text=Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional \(PSN\),krisis global pada 2008-2012](https://ekon.go.id/publikasi/detail/5407/libatkan-seluruh-pemangku-kepentingan-pemerintah-wujudkan-proyek-strategis-nasional-yang-miliki-manfaat-besar-dan-berdampak-luas#:~:text=Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN),krisis global pada 2008-2012).
- Maftuchan, A. (2021). Pemenuhan HAM dan Pembangunan Infrastruktur: Kajian Regulasi Proyek Strategis Nasional di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 14(14), 109–138. DOI: <https://doi.org/10.58823/jham.v14i14.108>.
- Nurbit, N., Barlian, E., Heldi, H., & Rahmat, H. (2025). Pemberdayaan Masyarakat dalam Mitigasi, Rekonstruksi, dan Rehabilitasi pada Wilayah Rawan Bencana Akibat Usaha Tambang Galian C di Kabupaten Kampar. *Al-Ihtiram: Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research*, 4(1), 97–108.

- Pramawati, F., Suaib, E., & Qomariyah, E. (2024). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 15(2), 171–182.
- Romadlan, S., & Fauziah, I. (2022). Konstruksi Realitas Media Online Mengenai Kekerasan Aparat Kepolisian Di Desa Wadas, Jawa Tengah. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 26(1), 53–70. DOI: <https://doi.org/10.17933/jskm.2022.4954>.
- Sahin, S., & Mete, J. (2016). Sustainable Development: Environmental, Economical, Social Well-Being for Today and Tomorrow. *Mimbar Pendidikan*, 1(1), 1. DOI: <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v1i1.1749>.
- Sefani, A., Salsabila, A. S., Arsita, L. Y., & Kirsanto, T. N. (2024). Konflik Agraria dan Keterlibatan Rezim Lokal pada Konflik Desa Wadas. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa (Village)*, 5(01), 1-15.
- Sibuea, H. Y.. (2022). Konflik Agraria Di Desa Wadas: Pertimbangan Solusi. *Info Singkat*, 14(4), 1–6.
- Sopanudin, A. (2016). Konflik Lahan Pertanian dalam Pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo. *E-Societas*, 6(1), 2–18.
- Syarifuddin, N. (2022). Pengaruh Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Lingkungan Maritim di Kabupaten Morowali. *Jurnal Riset & Teknologi Terapan Kemaritiman*, 1, 19–23. DOI: <https://doi.org/10.25042/jrt2k.122022.03>.
- Utami, w., Aji, K., Marini, M., Sugiyanto, C., & Rahardjo, N. (2023). Dampak Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 19(1), 105–117. <https://doi.org/10.14710/pwk.v19i1.37429>.
- Wadas Melawan. (2022). *Wadas Melawan*. Retrieve from https://twitter.com/Wadas_Melawan.
- Wadas Melawan. (2023). *Wadas Melawan*. Retrieve from https://twitter.com/Wadas_Melawan.
- Wadas Melawan. (2024). *Wadas Melawan*. Retrieve from https://twitter.com/Wadas_Melawan.